

jurnal **RECHTSVINDING**

Media Pembinaan Hukum Nasional

B 3

Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan

Ahmad Jazuli

Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar Dalam Negeri

Ahmad Redi

Telaah *Sociolegal* terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak atas Sumber Daya Air

Ria Casmi Arrsa

Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

M. Ilham F Putuhena

Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan

Henry Donald Lbn. Toruan

Problematika Hak Menentukan Nasib Sendiri:

Mengurai Hubungan antara Regulasi dan Konflik Sumber Daya Alam di Papua

Harison Citrawan

Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan

Aditia Syaprillah

Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia

Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono

Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara atas Wilayah Udara di tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan

Endang Puji Lestari

Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI

*Rechts*VINDING

ISSN 2089-9009

Media Pembinaan Hukum Nasional

Jurnal RechtsVinding merupakan majalah ilmiah hukum yang memuat naskah-naskah di bidang hukum.
Jurnal RechtsVinding terbit secara berkala tiga nomor dalam setahun di bulan April, Agustus, dan Desember.

- Pembina**
Adviser : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Pemimpin Umum**
Chief Executive Officer : Agus Subandriyo, S.H., M.H.
Plh. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan
Sistem Hukum Nasional BPHN
- Wakil Pemimpin Umum**
Vice Chief Executive Officer : Widya Oesman, S.H., M.H.
- Pemimpin Redaksi**
Editor in Chief : Apri Listiyanto, S.H.
- Anggota Dewan Redaksi**
Editorial Board : Ahyar Arigayo, S.H., M.H.
Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H.
Suharyo, S.H., M.H.
- Mitra Bestari**
Peer Reviewer : Prof. Dr. Sulistyawati Irianto, S.H., L.L.M.
(Antropologi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta)
Prof. Dr. IBR Supancana, S.H.
(Hukum Perdata Internasional, Universitas Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum. (Hukum Lingkungan, Universitas Airlangga, Surabaya)
Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
(Hukum Tata Negara, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto)
Prof. Dr. Rianto Adi, S.H., M.A. (Sosiologi Hukum, Universitas Atma Jaya, Jakarta)
Dr. Taufiqurrohman Syahuri, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara, Komisi Yudisial, Jakarta)
- Redaktur Pelaksana**
Managing Editor : Fabian Adiasta Nusabakti Broto, S.H.
- Sekretaris**
Secretaries : Tyas Dian Anggraeni, S.H., M.H.
Endang Wahyuni Setyawati, S.E.
- Tata Usaha**
Administration : Masnur Tiurmaida Malau, S.H., M.H.
Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H.
Muhaimin, S.H.
Viona Wijaya, S.H.
Lewinda Oletta, S.H.
Muhammad Ulul Azmi, S.H.
- Desain Layout**
Layout and cover : Iis Trisnawati, S.H.

Alamat:

Redaksi Jurnal RechtsVinding
Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.105, Fax.: 021-8011754
e-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id; jurnalrechtsvinding@gmail.com
website: www.rechtsvinding.bphn.go.id

Isi Jurnal RechtsVinding dapat dikutip dengan menyebutkan sumbernya
(Citation is permitted with acknowledgement of the source)

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	i-ii
Daftar Abstrak	
Dinamika Hukum Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam dalam Rangka Pembangunan Berkelanjutan Ahmad Jazuli	181-197
Darurat Kebijakan Pemenuhan Kebutuhan Hasil Sumber Daya Alam di Pasar Dalam Negeri Ahmad Redi	199-217
Telaah <i>Sociolegal</i> terhadap Terwujudnya Kedaulatan Hak Atas Sumber Daya Air Ria Casmi Arrsa	219-235
Politik Hukum Pengelolaan Hulu Migas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi M. Ilham F Putuhena	237-253
Pergeseran Paradigma Hukum Investasi Pertambangan Henry Donald Lbn. Toruan	255-277
Problematika Hak Menentukan Nasib Sendiri: Mengurai Hubungan antara Regulasi dan Konflik Sumber Daya Alam di Papua Harison Citrawan	279-294
Aspek Hukum Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan Lindung Pulau Tarakan Aditia Syapriallah	295-310
Politik Hukum Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua sebagai Strategi Menuju Ketahanan Energi di Indonesia Ananda Prima Yurista dan Dian Agung Wicaksono	311-325
Rekonsepsi Hak Penguasaan Negara atas Wilayah Udara di tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan Endang Puji Lestari	327-343

Biodata Penulis

Pedoman Penulisan Jurnal RechtsVinding

DARURAT KEBIJAKAN PEMENUHAN KEBUTUHAN HASIL SUMBER DAYA ALAM DI PASAR DALAM NEGERI

(Policy Emergency of Meeting the Needs of Natural Resources Products in Domestic Market)

Ahmad Redi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (UNTAR)

Jl. S Parman No.1 Grogol, Jakarta Barat

Email: ahmadr@fh.untar.ac.id

Naskah diterima: 5 Juni 2015; revisi: 10 Agustus 2015; disetujui: 19 Agustus 2015

Abstrak

Liberalisasi ekonomi berdampak pada liberalisasi produk sumber daya alam (SDA) Indonesia. Produk SDA secara ideal prioritaskan terlebih dahulu untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum diliberalisasi di pasar bebas karena yangkut ketahanan nasional Indonesia. Tulisan ini akan melakukan kajian mengenai: 1. Bagaimanakah pengaturan kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas komoditas sumber daya alam di Indonesia? dan 2. Hambatan dan tantangan apa saja yang mungkin timbul atas kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka ketahanan nasional? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif. Adapun jawaban permasalahan tersebut, pertama, peraturan perundang-undangan bidang SDA ada yang telah mengatur mengenai pemenuhan kebutuhan dalam negeri, tetapi ada pula peraturan perundang-undangan yang tidak mengatur. Kedua, hambatan pemenuhan kebutuhan dalam negeri atas hasil sumber daya alam meliputi hambatan regulasi, implementasi, dan kapasitas. Lalu selanjutnya, meliputi tantangan perkembangan paham liberalisasi, komodifikasi SDA, dan ketahanan SDA. Adapun saran dari hasil kajian ini, antara lain pembuat kebijakan harus menentukan secara ketat komoditas SDA yang akan diekspor; mengurangi bahkan menghilangkan ekspor bahan mentah; dan tegas kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pemenuhan kebutuhan dalam negeri.

Kunci: kebutuhan dalam negeri, SDA, pasar

Abstract

Economic liberalization made impact on natural resources product's liberalization in Indonesia. Natural resources products ideally prioritized to meet domestic needs before they are liberalized in the free market because they strategically enhance Indonesia's national resilience. This article will carry out assessment on: (1) How is the regulating obligation of meeting domestic need for Indonesia natural resources commodity products?; and (2) What obstacles and challenges that arise on this obligation of meeting domestic need in the frame of national resilience? The research use normative research method. The research's finding are, first, some of the legislative regulations on natural resources have ruled meeting the domestic need, however, there are others which have not. Second, the obstacles of meeting domestic need on natural resources products include obstacles of regulation, implementation, and capacity. The challenges include the development of liberalization idea development and natural resources resilience. The recommendation of this assessment is that the policy makers must set up regulation firmly on which natural resources product is exported, lowering or even reducing raw material export and act firmly to the business actors in fulfilling the obligation of meeting domestic needs.

Keywords: domestic needs, natural resources, market